

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan keaslian dan ciri yang dimiliki, desa merupakan wilayah penyangga yang memiliki pengaruh terhadap ketahanan dan pangan negara. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dikatakan bahwa desa perlu dilindungi dan diberdayakan dengan tujuan agar menjadi maju, kuat, dan mandiri. Dapat diketahui bahwa desa cenderung dicirikan sebagai wilayah yang tertinggal. Hal ini menjadi tantangan untuk menyukseskan pembangunan daerah khususnya di perdesaan. Saat ini pemerintah sedang fokus ke arah pertumbuhan ekonomi yang justru menggambarkan adanya kesenjangan antara desa dan kota sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada penguatan sumberdaya yang terserap di wilayah perkotaan, padahal cukup banyak potensi wilayah perdesaan yang dapat dikembangkan dan tidak hanya sekadar sebagai pengurusan sumberdaya berlebihan untuk mencukupi pembangunan maupun kebutuhan di kota saja. Oleh karenanya, pengentasan kemiskinan serta mengatasi kesenjangan antar wilayah saat ini menjadi penting dan merupakan tantangan tersendiri bagi desa yang menjadi subjek bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan karena dikenal luas oleh masyarakat dalam maupun luar negeri. Heterogenitas yang dimiliki Indonesia menjadi ciri khas tersendiri bagi negara seperti kekayaan alam yang disertai beragam budaya dan potensi yang dimiliki dapat dijadikan sebagai peluang yang dapat mendorong pengembangan

sektor wisata dan berdampak pada pembangunan negara yang salah satunya melalui fokus pengembangan pariwisata desa. Konsep pengembangan desa wisata itu sendiri dapat melalui pemberdayaan masyarakat lokal yang turut andil dalam perencanaan, pengelolaan dan partisipasi dalam setiap keputusan yang diambil dalam pembangunan. Dalam hal ini, maka apabila potensi sektor wisata dapat dikelola dengan baik dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian. Berangkat dari berbagai tantangan dan permasalahan yang menjadi kendala dalam pembangunan desa, maka pengembangan dan optimalisasi sektor wisata desa diyakini dapat menjadi solusi dalam peningkatan dan percepatan pembangunan perekonomian desa (Arifin 2017: 113).

Desa wisata menjadi salah satu asset dari industri pariwisata yang dapat menjadi penyumbang penghasilan negara (Wahyuni, 2020). Didefinisikan oleh Pariwisata Inti Rakyat (PIR), desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang dimanfaatkan kekayaannya tanpa menghilangkan suasana pedesaan itu sendiri sehingga keasrian yang diberikan tetap memberikan kesan asli dari desa, baik dari aspek kehidupan sosial budaya, perekonomian, adat istiadat, keseharian masyarakat, arsitektur bangunan, dan tata ruang desa yang khas dibiarkan tetap dalam bentuk aslinya. Dari keragaman itulah menjadi potensi yang kemudian dikembangkan agar menjadi daya tarik wisatawan dengan berbagai komponen, seperti atraksi, akomodasi, kuliner, dan kebutuhan pariwisata lainnya (Wahyuningsih & Pradana, 2021). Program desa wisata merupakan salah satu bentuk dari penerapan pembangunan pariwisata berbasis

pada masyarakat. Beragamnya kekayaan alam yang ada di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan desa menjadi tempat wisata.

Desa wisata sudah tidak asing lagi di Indonesia karena hampir seluruh daerah memiliki desa yang merangkap menjadi destinasi wisata. Seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang semakin kreatif memunculkan motivasi untuk mengubah desa menjadi tempat yang unik dan menarik sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luar daerah, hingga ke mancanegara (Wahyuningsih & Pradana, 2021). Konsep operasional desa wisata bergantung pada aspek sosial budaya dan aspek lingkungan yang berkembang sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Pengembangan desa menjadi destinasi wisata bukan hanya bentuk dari penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan, namun juga merupakan bentuk dari pemberdayaan desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, pemberdayaan desa merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan kemandirian dan tingkat kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan dapat memanfaatkan sumber daya lokal dengan baik, melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan masalah dan prioritas yang ada (Wibowo & Mulyono, 2018).

Pengembangan desa menjadi sebuah destinasi wisata merupakan alternatif untuk menjawab isu nasional dan global terkait kepariwisataan, salah satunya pariwisata berbasis masyarakat. Pengembangan pariwisata melalui desa

hendaknya dapat mendorong masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dalam proses pengembangannya. Menurut Rizkianto dan Topowijono (2018), terjadi perubahan persepsi dari para wisatawan mengenai pentingnya pariwisata yang bukan hanya berbasis pada konservasi lingkungan, melainkan juga pemberdayaan masyarakat (Herdiana, 2019). Desa wisata menjadi bentuk upaya pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa terutama untuk desa-desa tertinggal, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat terutama di pedesaan masih tergolong rendah. Desa wisata yang dikembangkan nantinya akan menggerakkan industri-industri masyarakat desa atau UMKM dan kegiatan ekonomi lainnya.

Pemerintah desa perlu mengerahkan masyarakat untuk meningkatkan optimisme, inovasi, dan kreativitas lokal untuk mendukung pengembangan desa wisata. Selain mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan wilayah, pengembangan desa wisata juga meningkatkan rasa bangga dari masyarakat terhadap desanya (Wahyuningsih & Pradana, 2021).

Theresia, dkk (2014: 117) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat miskin, marjinal atau terpinggirkan, agar menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, pilihannya, ikut berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat dengan tanggung jawab guna memperbaiki kualitas hidupnya, atau dalam arti lain pemberdayaan adalah upaya perbaikan mutu atau kesejahteraan hidup masyarakat (Wibowo & Mulyono, 2018). Dengan adanya upaya tersebut seharusnya pemberdayaan

masyarakat dapat memberi dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang berkualitas, baik pada dimensi sectoral atau seluruh aspek kehidupan, dimensi kemasyarakatan berupa kesejahteraan materiil dan non materiil, dimensi waktu dan kualitas, serta dimensi sasaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Iskandar, 2017).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berorientasi pada desa dengan memaksimalkan potensi lokal agar berdaya guna. Pemberdayaan masyarakat yang menjadi landasan dari pengembangan desa wisata dapat membebaskan masyarakat dari ketidakberdayaannya memenuhi kebutuhan hidup, serta mengurangi kemiskinan masyarakat desa dengan memberikan kekuatan dan melatih kemandirian mereka. Masyarakat diberdayakan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Melalui desa wisata, pemerintah menunjukkan keberpihakannya sebagai pelaku pertumbuhan ekonomi pada terbukanya lapangan pekerjaan di pedesaan yang dapat mengatasi kemiskinan di desa. Maka dari itu, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata sangat penting karena masyarakat lokal yang lebih mengetahui potensi dan kondisi desa, serta merekalah yang berperan dalam mengelola dan menjaga potensi yang dimilikinya. Dengan mengetahui potensi sumber daya manusia dan alamnya, masyarakat dapat menentukan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan pengembangan wisata di desanya, atau dalam kata lain masyarakat berperan sebagai pengambil keputusan.

Sebelum dilaksanakan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan karakteristik dari masyarakat itu sendiri untuk meminimalisir adanya konflik, karena tidak semua masyarakat bersedia menerima upaya pemberdayaan meskipun kegiatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi mereka. Dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang tepat terhadap masyarakat desa agar mereka bersedia berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan (Andrianto & Damayanti, 2018). Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala yang muncul sehingga dapat menghambat pemberdayaan masyarakat mencapai tujuan, antara lain rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi, minimnya pengetahuan masyarakat akan pariwisata, masyarakat kurang paham mengenai potensi daerahnya, terdapat kendala budaya, dan rendahnya kualitas SDM. Kurang optimalnya peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, karena masyarakat dari desa tersebut tidak mendapatkan manfaat dan keuntungan dari kegiatan desa wisata. Sehingga dalam penerapan pemberdayaan masyarakat perlu adanya kerja sama secara massif dari komponen-komponen penyelenggara, baik dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat itu sendiri, mengingat pengembangan desa wisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat bergesekan langsung dengan jasa pelayanan yang berkaitan dengan masyarakat. Perlu adanya pengoptimalan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengembangan desa wisata, seperti memberikan sosialisasi berkala terkait program pemberdayaan hingga manfaatnya, meningkatkan motivasi masyarakat untuk lebih maju, dan

melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa (Wibowo & Mulyono, 2018).

Banyak desa atau kelurahan di Jawa Tengah yang memiliki potensi dan perlu dikembangkan. Potensi yang dimiliki desa atau kelurahan di Jawa Tengah dapat dikembangkan melalui pengembangan desa wisata. Desa wisata memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengelola desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pengembangan desa wisata adalah program yang dirancang oleh pemerintah dengan melibatkan secara langsung partisipasi masyarakat setempat. Jumlah desa wisata di Jawa Tengah semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang membuktikan jika perkembangannya sangat pesat. Pertumbuhan rata-rata desa wisata di Jawa Tengah tahun 2013-2017 yaitu 4,31 %. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 15,08% menjadi 145 desa wisata dan pada tahun 2018 desa wisata di Jawa Tengah menjadi 229 desa wisata (Syaiful & Fafurida, 2019).

Jumlah desa wisata terbanyak di Provinsi Jawa Tengah yaitu terletak di daerah Kabupaten Semarang. Dari jumlah 229 desa wisata yang terdata di Provinsi Jawa Tengah, daerah Kabupaten Semarang memiliki total desa wisata paling banyak yaitu 30 desa wisata atau sekitar 7,64%. Salah satu desa wisata di kabupaten Semarang yang menjadi unggulan adalah Desa Wisata Lerep yang terletak di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Desa Wisata Lerep memiliki wilayah yang dominan perbukitan, memiliki pemandangan yang indah, terdapat curug dan juga hamparan sawah yang sangat luas. Desa Wisata Lerep juga memiliki prestasi yang bagus, salah satunya pada

tahun 2017 Desa Wisata Lerep mendapatkan juara 1 dalam Festival Desa Wisata tingkat Provinsi Jateng. Festival tersebut adalah kegiatan pembukaan ajang Borobudur International Festival (BIF) 2017 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang (Syaiful & Fafurida, 2019).

Data Badan Pusat Statistik tahun 2017 menunjukkan ada 25.242 wisatawan lokal yang berkunjung ke Desa Wisata Lerep, sedangkan wisatawan mancanegara belum ada data hingga tahun 2017. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan agar lebih fokus terhadap pengembangan Desa Wisata Lerep sehingga dapat terkenal sampai ke mancanegara. Untuk data jumlah wisatawan terbaru yang bersumber dari daftar kunjungan tamu Pokdarwis Rukun Santoso Desa Wisata Lerep pada tahun 2022 yaitu berjumlah 7035 tamu. Desa Wisata Lerep merupakan salah satu desa wisata percontohan di Provinsi Jawa Tengah yang banyak dikunjungi masyarakat untuk berwisata ataupun dijadikan sebagai tempat studi banding desa lain. Desa Wisata Lerep terletak di lereng Gunung Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kab. Semarang, suasana pegunungan dengan udara sejuk dan pemandangan yang indah. Desa Lerep ditetapkan sebagai Desa Wisata pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang No 556/0431/ 2015.

Pada tahun 2015 Desa Wisata Lerep dikelola oleh Pokdarwis Rukun Santoso, namun setelah terbentuknya BUMdes Gerbang Lentera pengelolaan Desa Wisata dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat No 3 Tahun 2017 dimana Kegiatan Pariwisata

merupakan salah satu unit usaha BUMDes. Desa Wisata Lerep mengandalkan kearifan lokal dan kreativitas warga dalam menyuguhkan paket-paket wisata Desa. Sampai sekarang ini pengembangan Desa Wisata Lerep sudah melibatkan peran aktif dari masyarakat lokal, dengan demikian bentuk upaya dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Lerep dapat dikatakan sudah baik. Desa Lerep juga salah satu desa yang tingkat perekonomiannya semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena “UU Desa” mengatur bahwa dana desa yang diperoleh Desa Lerep dapat digunakan untuk pembangunan desa supaya lebih mandiri dan sejahtera sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Karena menurut undang-undang desa tersebut, desa dapat menentukan pembangunan apa saja yang dibutuhkan masyarakatnya (Susanawati et al., 2019).

Pengaruh besar yang diperoleh masyarakat Desa Lerep setelah adanya pemberdayaan guna mengembangkan desa wisata diantaranya menambah pendapatan masyarakat desa, meningkatkan perekonomian warga serta tersedianya lapangan pekerjaan yang layak. Contoh dari masyarakat yang sudah berkembang setelah adanya pemberdayaan yaitu meningkatnya UMKM, jasa persewaan (fotografi), jasa persewaan acara pesta dan juga transportasi.

Desa Lerep menggunakan model pemberdayaan “merangkul” masyarakatnya yang memiliki usaha untuk ikut berpartisipasi apabila ada tamu wisata yang berkunjung ke Desa Lerep. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, tentu pemerintah desa juga memiliki peran penting seperti memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana, pelatihan UMKM, studi

banding ke desa lain yang berkaitan dengan desa wisata, pembangunan lapak kuliner dan sarpras Pokdarwis. Terlepas dari semua itu, masyarakat tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap berhasilnya pengembangan desa wisata dikarenakan kesuksesan masyarakat, kekompakan masyarakat dan dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang di atas diperlukan penelitian lebih lanjut yang mampu menganalisis dan menjawab bagaimana pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep menggunakan beberapa prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu kerja sama dan partisipasi, demokratis, keragaman budaya, minat dan kebutuhan, kelompok masyarakat bawah menurut Dahana dan Bhatnagar (1980). Kemudian tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan menurut Sumodiningrat (2007:145) yaitu tahap pembentukan perilaku sadar, tahap transformasi kemampuan kerja dengan wawasan dan tahap peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan dan kecakapan serta apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat berupa pengetahuan dan ilmu khususnya ilmu pemerintahan mengenai pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pembangun ilmu pengetahuan secara teoritis di perkuliahan.

- b. Manfaat Praktis:

- 1). Memberikan sumbangan penelitian bagi pihak Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka mengefektifkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep. Selain itu, penelitian ini menjadi bahan pemikiran atau masukan bagi pemerintah dalam mengatasi kendala serta hambatan dalam pengembangan Desa Wisata Lerep.

- 2). Manfaat penelitian bagi peneliti adalah memenuhi tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar strata satu. Selain itu, penelitian ini bermanfaat dalam menambah kemampaun serta keterampilan peneliti dalam pembuatan karya ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengidentifikasi pengembangan desa berbasis pemberdayaan masyarakat dengan mata kuliah yang telah didapat, seperti Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3). Manfaat bagi masyarakat umum adalah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat sebagai basis pengembangan desa.
- 4). Manfaat bagi Universitas Diponegoro adalah menambah informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengembangkan penelitian dengan topik yang sama. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dalam penelitian ini. Studi kasus adalah studi yang akan memahami suatu fenomena atau kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi yang lengkap dengan cara mengikuti prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menambah informasi, mendapatkan kajian teoritis dan pembandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang akan atau sedang dilakukan terkait dengan pengembangan desa wisata dan juga pemberdayaan masyarakat. Beberapa penelitian terkait diantaranya yaitu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017).	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali).	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat melibatkan peran serta masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ada berbagai kendala dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi. Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berdampak terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa penguatan dan juga perubahan tata nilai sosial, budaya dan lingkungan.
Andrianto, R. H., & Damayanti, M. (2018).	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan	Kualitatif	Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pentingsari berjalan secara bertahap. Dalam perkembangannya, ada upaya-upaya

	Desa Wisata, Studi Kasus: Desa Wisata Pentingsari, DIY		pemberdayaan seperti tahap sosialisasi. Dalam tahap ini tokoh pencetus dan penggerak akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat termotivasi serta memberi pemahaman agar masyarakat ikut andil dalam pengembangan dan juga pemberdayaan. Kemudian masyarakat diberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan tersebut maka masyarakat Desa Pentingsari akan lebih mandiri.
Prihastha, A. K., & Suswanta, S. (2020).	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan.	Kualitatif	Desa Wisata Kaki Langit yang berada di Padukuhan Mangunan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah desa. Keindahan alam, keragaman budaya, tradisi dan potensi masyarakat menjadi penggerak Desa Wisata Kaki Langit berkembang dengan pesat. Masyarakat di Desa Wisata Kaki Langit mengembangkan wisata kuliner tradisional penginapan berkonsep pedesaan Jawa, wisata outbond, dan wisata alam. Partisipasi secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat berdampak positif terhadap perekonomian warga. Kesimpulannya pariwisata lokal melalui pengembangan desa wisata dengan pemberdayaan masyarakat mampu membawa dampak ekonomi bagi masyarakat.
Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021).	Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu.	Deskriptif Kualitatif	Desa Hendosari telah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan beberapa tahapan dimulai dari tahap seleksi lokasi, tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat, tahap pemberdayaan masyarakat, dan tahap pemandirian masyarakat. Hasil dari pemberdayaan masyarakat di Desa Hendosari melalui pengembangan Desa Wisata Lontar Sewe adalah meningkat dan berkembangnya kemandirian serta kreativitas masyarakat, pengelolaan tempat wisata lontar sewu yang semakin meningkat, serta sumber daya alam yang ada telah di manfaatkan sebaik mungkin. Peningkatan kemandirian masyarakat dapat dilihat dari terbentuknya berbagai kelompok-kelompok yang diberdayakan sebagai hasil

			dari pemberdayaan masyarakat seperti Kelompok Petani Siwalan, UMKM Batik As-Salam, UMKM Pedagang, dan Cafe Lontar.
Susanawati, N., Pristiria, R. A., & Astuti, R. S. (2019).	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Lerep adalah pelaku utama pengembangan desa wisata tersebut, dimana merekalah yang mengetahui apa potensi yang dimiliki desanya. Partisipasi masyarakat lebih banyak digunakan pada tahap implementasi daripada tahap perencanaan dan pengawasan. Beberapa faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep yaitu adanya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi desanya, masyarakat memiliki semangat dan optimis dalam mengembangkan desa wisatanya, serta adanya dukungan dari pemerintah terkait pengembangan desa wisata.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengkaji tentang pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat. Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lerep. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada bagian judul, objek yang diteliti serta teori yang digunakan dalam penelitian.

1.5.2 Pemberdayaan Masyarakat

Kartasmita (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses individu dan masyarakat, yaitu memperkuat kemampuan individu,

meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kreativitas. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan peningkatan kapasitas pemerintah desa sehingga dapat menjangkau pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan, serta kemampuan pemetaan dan analisis sosial para pemangku kepentingan. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan destinasi wisata juga sangat bergantung pada kesamaan visi masyarakat setempat dan pemerintah daerah, serta kerjasama dan partisipasi masyarakatnya. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dan unsur-unsur penting (stakeholder) dalam koridor pemerintahan desa yang baik harus dilaksanakan di kedua sisi yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan yang bertujuan untuk membangun diri bersama dan memperkuat modal sosial dalam paradigma “membangun desa” (Rochman, 2016). Pemberdayaan masyarakat menjadi alat untuk memastikan pembangunan kepariwisataan dapat berdaya guna bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata. Adanya pengembangan desa wisata, masyarakat lokal diharapkan dapat mengambil manfaat dari aktivitas pariwisata yang dikembangkan di sekitarnya.

Sedangkan menurut Ganjar Kartasasmita menjelaskan jika konsep pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi pembangunan kerakyatan. Dari potensi dan kelestarian yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, dapat menjadi variasi lokal yang cocok untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat lokal telah memiliki identitas dan tradisi yang sudah turun-temurun dari leluhurnya yang ada dalam desa tersebut. Pelestarian tradisi

yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat desa ditunjukkan dengan pengadaaan acara sakral sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan (Prihasta, A. K., & Suswanta, S, 2020). Menurut Widjaja (2011) dijelaskan bahwa hal utama dari pemberdayaan adalah upaya untuk membangkitkan semua kemampuan desa yang ada agar mencapai tujuan. Tercapainya tujuan itu dapat dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk mendapatkan kesejahteraan bagi desa baik perekonomian dan lain sebagainya (Endah, 2020).

Dalam pemberdayaan terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan (Dahana dan Bhatnagar, 1980), yaitu:

- 1) Kerja sama dan partisipasi. Keberhasilan proses pemberdayaan dapat terjadi jika ada kerja sama yang solid diantara berbagai elemen masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk mewujudkan program yang sudah di rancang sebelumnya.
- 2) Menggunakan metode yang tepat. Seharusnya metode yang diterapkan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi target kegiatan pemberdayaan sehingga metode tersebut akan efektif dan efisien serta berdaya guna.
- 3) Demokratis. Sifat demokratis sebaiknya menjadi dasar dalam proses melaksanakan kegiatan pemberdayaan agar memberi kesempatan luas kepada masyarakat untuk memilih metode yang tepat digunakan termasuk juga proses pengambilan keputusan yang dibuat masyarakat.

- 4) Minat dan kebutuhan. Pemberdayaan masyarakat harus berdasar pada apa yang menjadi prioritas utama dan terkait dengan minat serta kebutuhan masyarakat sehingga hasilnya menjadi efektif dan efisien.
- 5) Kelompok masyarakat bawah. Agar pelaksanaan program yang telah dibuat sebelumnya lebih optimal maka target pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih kepada mereka yang termasuk dalam kategori masyarakat kalangan bawah.
- 6) Keragaman budaya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan keragaman budaya lokal yang ada, karena jika kegiatan dilakukan sesuai dengan prinsip keseragaman budaya maka dapat menimbulkan berbagai masalah dan kendala di lapangan.
- 7) Terarah dan spesialis. Orang-orang atau fasilitator yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mereka yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam suatu hal terutama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan tenaga spesialis.
- 8) Belajar sambil bekerja. Artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian konsep dan gagasan teoritis saja, tetapi yang lebih penting kelompok sasaran terlibat secara aktif dan berusaha melakukan kegiatannya sendiri sesuai dengan arahan fasilitator agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja menggunakan konsep-konsep yang didapat dari penyuluh.

- 9) Perubahan budaya. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan nilai budaya lokal kelompok sasarannya. Hal tersebut dapat menghindari munculnya kejutan budaya pada kelompok sasaran pemberdayaan masyarakat dan para penyuluh diharapkan dapat bertindak dengan sangat hati-hati dan mengetahui lebih dahulu bagaimana nilai budaya kelompok masyarakat yang menjadi target pemberdayaan.
- 10) Kepemimpinan. Pada pelaksanaan proses pemberdayaan jangan hanya menguntungkan pada satu pihak saja contohnya yaitu para penyuluh. Namun sebaiknya proses pemberdayaan ini dapat lebih dimanfaatkan oleh para tokoh di masyarakat sehingga dapat membantu dalam melancarkan pelaksanaan pemberdayaan.
- 11) Segenap keluarga. Supaya target pemberdayaan dapat diwujudkan, sebaiknya kalangan tenaga penyuluh dapat memperlakukan keluarga sebagai suatu bagian sistem sosial. Caranya yaitu dengan mengaktifkan peran anggota keluarga agar dapat bekerja sama antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Sumodiningrat (2007:145) terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (Iskandar, 2017a), diantaranya:

- a. Tahap pembentukan perilaku sadar dan penyadaran dan peduli agar dapat merasakan butuh peningkatan kapasitas diri.

- b. Tahap transformasi kemampuan kerja dengan wawasan dan pengetahuan yang terbuka, keterampilan, dan kecakapan supaya membuka wawasan serta memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan dan kecakapan sehingga muncul kemampuan inovatif dan inisiatif untuk mengarahkan pada kemandirian.

1.6 Definisi Konsep

Berdasarkan dari beberapa teori yang telah penulis cantumkan, penulis mendefinisikan konsep teori sebagai berikut.

Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan serta kemandirian masyarakat dengan beberapa tahapan seperti pembentukan perilaku sadar, tahap transformasi kemampuan kerja dengan wawasan dan tahap peningkatan kemampuan intelektual sebagai persiapan untuk mencapai suatu tujuan.

1.7 Operasional Konsep

Operasional konsep merupakan suatu tahapan dalam penelitian dimana peneliti akan menurunkan variabel penelitian dalam sebuah konsep sehingga akan mempermudah peneliti untuk memahami dan menentukan indikator yang akan digunakan dalam pembahasan.

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengoperasionalisasi konsep penelitian ini adalah beberapa prinsip di dalam pemberdayaan menurut (Dahana dan Bhatnagar, 1980) yaitu kerja sama dan partisipasi, demokratis, keragaman budaya, minat dan kebutuhan, kelompok masyarakat bawah serta tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan menurut Sumodiningrat (2007:145) yaitu tahap pembentukan perilaku sadar, tahap transformasi kemampuan kerja dengan wawasan dan juga tahap peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan dan kecakapan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada penyelidikan terhadap fenomena sosial dan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Secara umum metode kualitatif dapat digunakan untuk penelitian yang berhubungan dengan sejarah, masalah sosial, konsep atau fenomena, kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif digunakan karena menurut peneliti metode ini dapat menemukan dan memahami hal-hal yang tidak terlihat dibalik fenomena yang sangat sulit untuk dimengerti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan informan dan melakukan studi pada situasi yang alami.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian dengan format deskriptif kualitatif. Tipe penelitian deskriptif kualitatif umumnya dilakukan dalam bentuk studi kasus yang memiliki ciri tidak seperti air yang menyebar ke permukaan, melainkan memusatkan diri dalam unit tertentu pada suatu fenomena. Dengan pendekatan ini, maka penelitian akan dapat dilakukan secara mendalam dalam memperoleh data. Sehingga penelitian bersifat mendalam dan tepat pada sasaran penelitian (Bungin, 2007). Tipe penelitian deskriptif dalam bentuk studi kasus cocok apabila digunakan untuk meneliti sebuah implementasi kebijakan publik, dalam hal ini kebijakan pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berlokasi di lingkungan Desa Wisata Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang untuk meneliti pengembangan desa wisata yang telah berjalan dan sejauh mana masyarakat telah diberdayakan. Peneliti juga melakukan penelitian di Kantor Pemerintahan Desa dan Pokdarwis yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Lerep. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Wisata Lerep merupakan desa wisata unggulan yang berada di Kabupaten Semarang dan dapat memberikan informasi serta data yang lengkap mengenai pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.

1.8.3 Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya memahami fenomena terkait permasalahan yang terjadi pada subjek penelitian. Subjek penelitian didefinisikan oleh Moloeng (2010: 132) sebagai informan atau orang yang terlibat dalam penelitian untuk dapat memberikan informasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan subjek dimana sample dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya. Teknik pengambilan subjek ini dirasa cocok dengan topik penelitian. Subjek yang dipilih adalah orang-orang yang dirasa paling paham terkait topik penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menelusuri pengembangan Desa Wisata Lerep berbasis pemberdayaan masyarakat. Subjek yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi-informasi dan data yang lengkap serta rinci terkait pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep. Pada penelitian ini, penulis memperoleh data melalui informan sebanyak 10 orang meliputi Kepala Desa Lerep, Sekretaris Desa Lerep, Direktur BUMdes Gerbang Lentera, Ketua Pokdarwis Rukun Santoso, pengelola kelompok wanita tani, pengelola kelompok *homestay*, pengelola kelompok kuliner, pengelola kelompok kesenian, pengelola kelompok ternak dan masyarakat. Dari pihak pemerintah desa dapat memberikan informasi mengenai struktur dan program pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan desa wisata.

Sementara dari pihak masyarakat dapat memberikan informasi mengenai jalannya program pemberdayaan dan dampak yang dirasakan.

1.8.4 Jenis Data

Terdapat dua jenis data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, bukan angka (Noeng Muhadjir, 1996). Sementara data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung, berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis data kualitatif, dimana data berbentuk non numerik atau bukan angka yang berisi analisis terkait kondisi yang terjadi pada fokus penelitian sehingga membantu peneliti dalam menentukan masalah.

1.8.5 Sumber Data

Menurut Moloeng, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexi J. Moleong, 2005). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara mendalam terhadap informan dari Pemerintah Desa Lerep dan masyarakat Desa Lerep, serta

observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap Desa Wisata Lerep.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang diperoleh dari catatan, laporan historis, arsip, dan dokumen dari topik penelitian terkait. Data sekunder ini dapat melengkapi data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah buku, peraturan kebijakan, stuktur organisasi, literatur dari penelitian terdahulu, dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, misalnya penelitian lapangan, observasi, hingga wawancara mendalam (Bungin, 2010). Untuk memperoleh data yang konkrit, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak penanya dan pihak penjawab. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang perlu

diteliti dan untuk memenuhi keingintahuan peneliti yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016b). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dan informasi mendalam terkait pengembangan Desa Wisata Lerep berbasis pemberdayaan masyarakat. Wawancara dilakukan semi terstruktur, dimana peneliti menggunakan interview guide sebagai instrument penelitian yang berisikan pedoman kisi-kisi pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Selain interview guide, peneliti juga menyiapkan alat tulis, kamera, serta alat record untuk mencatat hal-hal penting serta mendokumentasikan jalannya wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu atau kelompok yang terlibat dengan kasus yang akan diteliti (John W. Creswell, 2016). Peneliti melakukan observasi non partisipan, yaitu peneliti melakukan pengamatan tanpa melibatkan diri secara langsung dalam aktivitas yang diamatinya, sementara peneliti hanya mencatat dan menganalisis aktivitas tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada lingkungan Desa Lerep dan Kantor Pemerintahan Desa untuk mengamati aktivitas pengurus desa dalam

menjalankan program pengembangan desa wisata dan implementasi pemberdayaan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari data terkait topik atau variable yang diteliti berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalan. Prasasti, notulen rapat, dan sebagainya (Arikunto, 2016). Peneliti mencari data melalui buku, peraturan undang-undang, artikel berita, jurnal penelitian terdahulu, dan lain-lain.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai sesuatu yang kritis dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016a). Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexi J. Moleong, 2007). Menurut Miles dan Huberman mengkalsifikasikan aktivitas analisis data sebagai berikut (Sugiyono, 2016b):

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting. Reduksi data bertujuan untuk

mempermudah pemahaman terkait data yang terkumpul sehingga dapat menyajikan gambaran yang lebih rinci dari fenomena yang diteliti. Hal-hal yang tidak berkenaan dengan fokus penelitian mengenai pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep harus dihilangkan agar pembahasan tidak melenceng dari tujuan awal.

2) Display Data

Display atau penyajian data merupakan penyajian data hasil penelitian yang disusun secara rinci untuk memberikan gambaran terkait fenomena yang diteliti secara utuh. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teori yang dipilih oleh peneliti. Dari hasil analisis data dan teori yang digunakan, peneliti akan mendapat hasil dari pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Lerep sesuai dengan tujuan penelitian.

3) Kesimpulan atau Verifikasi

Pada kesimpulan, peneliti memberikan makna dari data yang telah dianalisis. Setelah melalui reduksi dan display data, pada akhir penelitian akan terdapat kesimpulan terkait data yang telah dihubungkan dengan teori, kemudian diverifikasi atau diuji validitasnya. Dengan menyimpulkan hasil penelitian akan memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian mengenai pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Lerep.

1.8.8 Kualitas Data

Data-data yang telah terkumpul perlu diuji keabsahannya. Keabsahan data sangat penting untuk menjamin data yang diperoleh valid atau tidak, data harus diuji karena peneliti bertanggung jawab atas kebenaran data yang dikumpulkannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan terhadap data itu. Menurut Patton, terdapat empat jenis triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, yaitu pemeriksaan data dengan memanfaatkan sumber data yang berbeda-beda.
- b. Triangulasi metode, yaitu pemeriksaan data dengan membandingkan metode pengumpulan data yang berbeda untuk menguji kemantapan informasi.
- c. Triangulasi peneliti, yaitu hasil penelitian bisa diuji validitasnya dengan hasil penelitian dari peneliti lain.
- d. Triangulasi teori, yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan perspektif dari teori-teori yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber, dimana pemeriksaan data memanfaatkan sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis, antara lain sumber data wawancara, sumber data observasi, dan sumber data dari dokumentasi.